

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN**
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH:

ATIKA KURNIADI
NPM : 171000462201056

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2021



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
FAKULTAS EKONOMI

Jln. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Solok Telp. 0755-20565
Jln. Tembok, Ampang Kualo, Nan Balimo, Kota Solok Telp. 0755-20127
Website : www.ummy.ac.id, email : fe.ummysolok@gmail.com

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin mengesahkan Skripsi Mahasiswa dengan judul :

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN**
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)

Diajukan oleh :

ATIKA KURNIADI
NPM: 171000462201056

Telah disetujui dan memenuhi ketentuan penulisan skripsi yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Pembimbing I

WITRA MAISON, S.E., M.Si.
NIDN. 1022026304

Pembimbing II

Hj. NIDIA ANGGRENI DAS, S.E., MM.
NIDN. 101417302

1984
★ Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok



JUITA SUKRAINI, S.E., M.Si.
NIDN. 1017116201



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
FAKULTAS EKONOMI

Jln. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Solok Telp. 0755-20565
Jln. Tembok, Ampang Kualo, Nan Balimo, Kota Solok Telp. 0755-20127
Website : www.ummy.ac.id, email : fe.ummysolok@gmail.com

LEMBARAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Atika Kurniadi
NPM : 171000462201056
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang Tim Penguji komprehensif Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputera Muhammad Yamin dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 20 September 2021, serta skripsi sesuai dengan penulisan yang disarankan oleh Tim Penguji pada Ujian Komprehensif.

Menyetujui Tim Penguji:

1. Ketua : WITRA MAISON, S.E., M.Si. (.....)
NIDN. 1022026304
2. Sekretaris : Hj. NIDIA ANGGRENI DAS, S.E., MM. (.....)
NIDN. 101417302
3. Anggota : JUITA SUKRAINI, S.E., M.Si. (.....)
NIDN. 1017116201
4. Anggota : Dr. LILI WAHYUNI, S.E., M.Si. (.....)
NIDN. 1008017801
5. Anggota : RITA DWI PUTRI, S.E., M.Si. (.....)
NIDN. 1013088402

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ATIKA KURNIADI**
NIM : **171000462201056**
Fakultas : **EKONOMI**
Program Studi : **AKUNTANSI**

Menyatakan bahwa :

1. Sesungguhnya skripsi yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain, telah saya tuliskan sumbernya dengan jelas sesuai kaidah penulisan ilmiah.
2. Jika dalam pembuatan skripsi ini secara keseluruhan terbukti dibuatkan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang akan diberikan akademik, berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian serta mengajukan judul yang baru.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Solok, 20 September 2021
Saya yang menyatakan



ATIKA KURNIADI
171000462201056

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, petunjuk, dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua saya yaitu Bapak Yurkanedi, Ibu Murnis, Fadhli Efendi S.E, Aulia Rahmah Nedi S.Pd, Alfitra Fatah Hilah, dan Ponakan saya Abdullah Hafidz, yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing I saya Bapak Witra Maison, SE, M.Si, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta ilmunya juga untuk membantu saya dalam menulis skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing II saya Ibu Nidia Anggreni Das, SE, M.M, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Dan juga sudah sangat sabar sekali dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Almamater saya yaitu Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang saya banggakan dan cintai.

MOTTO

PAKSA

BISA

TERBIASA

-ATIKA KURNIADI-



**PENGRUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2020)**

ATIKA KURNIADI
171000462201056

Pembimbing 1 : WITRA MAISON, SE, M.Si

Pembimbing 2 : HJ. NIDIA ANGGRENI DAS, SE, M.M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari [Http://sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id). Analisis yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, koefisien determinasi *r-square* dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t* hitung sebesar $0,686 < 1,6657$, dan nilai signifikansi sebesar $0,495 > 0,05$. (2) Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t* hitung sebesar $0,613 < 1,6657$, dan nilai signifikansi sebesar $0,542 > 0,05$. (3) Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t* hitung sebesar $5,435 > 1,6657$, dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. (4) Dana perimbangan, belanja daerah dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *F* hitung sebesar $19,311 > 2,34$ dengan nilai signifikannya $0,00 < 0,05$.

**Kata Kunci : Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah,
Kinerja Keuangan**

**THE EFFECT OF BALANCED FUNDS, REGIONAL EXPENDITURES
AND REGIONAL ORIGINAL REVENUE ON FINANCIAL
PERFORMANCE (EMPIRICAL STUDY ON REGENCY/CITY
GOVERNMENTS OF WEST SUMATRA PROVINCE 2017-2020)**

ATIKA KURNIADI
171000462201056

Supervisor 1 : WITRA MAISON, SE, M.Si

Supervisor 2 : HJ. NIDIA ANGGRENI DAS, SE, M.M

ABSTRACT

This study aims to determine the Effect of Balancing Funds, Regional Expenditures and Regional Original Revenues on the Financial Performance of Districts/Cities in West Sumatra Province in 2017-2020. The sample used is 19 districts/cities in West Sumatra Province in 2017-2020. The sampling technique used was total sampling. The type of data used is secondary data in the form of financial reports obtained from [Http://sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id). The analysis used includes normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, r-square coefficient of determination and hypothesis testing.

The results of this study indicate that (1) balancing funds have no effect on financial performance. This is evidenced by the t arithmetic value of $0.686 < 1.6657$, and a significance value of $0.495 > 0.05$. (2) Regional expenditures have no effect on financial performance. This is evidenced by the t arithmetic value of $0.613 < 1.6657$, and a significance value of $0.542 > 0.05$. (3) Local revenue partially affects financial performance. This is evidenced by the t-count value of $5.435 > 1.6657$, and the significance value of $0.000 < 0.05$. (4) Balancing funds, regional expenditures and regional original revenues simultaneously affect financial performance. This is evidenced by the calculated F value of $19.311 > 2.34$ with a significant value of $0.00 < 0.05$.

Keywords : Balancing Fund, Regional Expenditure, Regional Original Income, Financial Performance

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan skripsi penulis yang berjudul “PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok. Ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya dalam membuat skripsi yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan Petunjuk, Hidayah, dan Karunia-Nya, sehingga saya bisa menulis skripsi sampai selesai.
2. Untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Yurkanedi, ibu Murnis, abang Fadhli Effendi, kakak Aulia Rahmah Nedi, adik saya Alfitra fatahillah, dan keponakan pertama saya yaitu Abdullah Hafidz
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P, selaku Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
4. Ibuk Juita Sukraini S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
5. Ibuk Rita Dwi Putri S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
6. Bapak Witra Maison S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membantu saya dalam menulis skripsi ini.

7. Ibuk Hj. Nidia Anggreni Das S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membantu saya dalam menulis skripsi ini.
8. Ibuk Rita Dwi Putri S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu tentang seluk-beluk akuntansi kepada saya.
10. Buat Mami Papi Aisyah sudah memperbolehkan saya nginap dan memberikan saya semangat yaitu Mami Susi dan Papi Wat
11. Sahabat pejuang skripsi saya yaitu Siti Aisyah S.Ak dan Sherin Sepbrina S.Ak yang tak dapat dijelaskan kronologisnya
12. Teman-teman seperjuangan yaitu Annisa Anyuk, Feby Ratu Ghibah, Boss Hazel S.Ak, Bg Wahyu, Delva Alias Deppo, Surya/Isur, Indro, Andika/Oom, dan lain-lain.
13. Teman rumahku yaitu Mona Muver dan Mutia Rahmi
14. Teman onlineku yaitu Nurhildayanti dan Syifa.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam membuat skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya menerima semua kritik dan saran dari semua pihak, agar kesempurnaan skripsi ini dapat dicapai. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi keilmuan akuntansi.

Solok, Agustus 2021

Atika Kurniadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	6
KATA PENGANTAR.....	8
DAFTAR ISI	10
DAFTAR GAMBAR.....	12
DAFTAR TABEL	13
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Kinerja Keuangan	12
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2.3 Belanja Daerah.....	23
2.4 Dana Perimbangan.....	25
2.5 Penelitian Terdahulu	30
2.6 Kerangka Berpikir.....	38
2.7 Pengembangan Hipotesis	39
2.7.1 Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan.....	39
2.7.2 Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan	40
2.7.3 Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan.....	42
2.7.4 Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Populasi Dan Sampel	46
3.2.1 Populasi	46
3.2.2 Sampel	46
3.3 Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.3.1 Jenis Data.....	48

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	48
3.4 Variabel Penelitian	49
3.5 Defenisi Operasional Variabel.....	49
3.6 Teknik Analisis Data	51
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	51
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	51
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda	55
3.6.4 Uji Hipotesis.....	56
3.6.5 Koefisien Determinasi (R^2)	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Gambaran Objek Penelitian	59
4.2 Hasil Analisis Data.....	63
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	75
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....37



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel	48
Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi.....	53
Tabel 4.1 Daftar Sampel.....	61
Tabel 4.2 Data Dana Perimbangan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.....	63
Tabel 4.3 Data Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.....	65
Tabel 4.4 Data Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	67
Tabel 4.5 Data Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.....	69
Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif.	71
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	73
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas	75
Tabel 4.9 Hasil Heteroskedastisitas	76
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	78
Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	79
Tabel 4.13 Hasil Uji t	81
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	82
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara adalah wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan negara. Organisasi tersebut merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bersifat nirlaba. Lembaga pemerintah pada setiap negara memiliki peranan dalam meningkatkan pelayanan guna memfasilitasi kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan penerapan kebijakan otonomi pada suatu daerah.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan keuangan. Penilaian kinerja dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama yaitu aspek yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keuangan organisasi atau tertentu disebut dengan kinerja non keuangan (*non financial performance*). Aspek kedua yaitu aspek aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan organisasi atau instansi tertentu dikatakan sebagai Kinerja Keuangan (*financial performance*).

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Pongoh, 2013). Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Berdasarkan pasal 4 ayat 1 SAP No. 71 tahun 2010 pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*), Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III SAP No. 71 tahun 2010 tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Sebagai implikasinya, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Berdasarkan pasal 31 ayat 1 PP No. 19 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mengungkapkan bahwa PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Bastian, 2012).

Tabel 1.1
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2017-2020

Tahun	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)		
	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
2017	Rp. 2.530.121.133	Rp. 14.829.844.350	Rp. 19.415.152.589
2018	Rp. 1.977.353.904	Rp. 15.051.531.840	Rp. 19.825.614.942
2019	Rp. 2.097.851.123	Rp. 15.865.822.519	Rp. 21.846.652.410
2020	Rp. 2.650.316.185	Rp. 16.039.147.172	Rp. 22.825.783.224
Total	Rp. 9.255.642.345	Rp. 61.786.345.881	Rp. 83.913.203.165
Persentase	6,1%	39,8%	54,1%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Secara keseluruhan PAD setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan selama 4 tahun penelitian yang berarti pendapatan yang dihasilkan oleh daerah menunjukkan konsistensi pendapatan yang meningkat setiap tahunnya. Naiknya PAD diikuti oleh penerimaan Dana Perimbangan yang setiap tahunnya juga relatif naik. Jika ditinjau dari segi kemandirian daerah, PAD mengalami kenaikan sebesar 6,1% dan dana perimbangan sebesar 39,8%, artinya lebih dari setengah pengeluaran belanja daerah bersumber dari dana perimbangan. Hal itu menandakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan dana perimbangan dalam membiayai belanja daerah yang penggunaannya harus digunakan secara optimal.

Besarnya dana perimbangan menunjukkan bahwa ketersediaan dana dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan lebih baik sesuai

dengan tujuan dana perimbangan (Awwaliyah, 2019). Menaikkan anggaran belanja daerah yang besar merupakan upaya untuk mendapatkan jumlah transfer yang besar. Pernyataan tersebut bisa menggambarkan masih kurang optimal pengelolaan keuangan daerah sehingga hal tersebut menimbulkan konsekuensi logis yang harus diterima oleh Pemerintah Daerah yaitu buruknya penilaian kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk meminimalisir dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi-potensi dan kemampuan sumber daya daerahnya untuk mendapatkan penerimaan pendapatan yang maksimal juga.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Saputri, 2020). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, artinya adanya kenaikan PAD dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Indriani dan Sastradipraja, 2014) menyatakan secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian (Andirfa, 2016) menyatakan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian (Sari, 2016) menyatakan bahwa dana perimbangan terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja daerah dalam penelitian ini dihitung dari besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 36 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan bahwa belanja daerah merupakan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Tujuan dipergunakannya belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan bersama.

Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial (Pongoh, 2013). Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. (Retnowati, 2016).

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik menurut penelitian (Wahyuningsih, 2020). Dana perimbangan

ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Berdasarkan pasal 288 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Ketiga jenis sumber dana tersebut, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pengeluaran pemerintah daerah yang dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan. Kegiatan belanja daerah turut berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki daerah, (Antari dan Sedana, 2018). Belanja daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan publik pada suatu daerah. Belanja yang dilakukan pemerintah memiliki fungsi sebagai suatu kebijakan ekonomi yang akan berdampak pada kemandirian daerah dan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah, belanja pemerintah dapat menyebabkan terjadinya stabilitas pada perekonomian (Menyah dan Rufael, 2013).

Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan fungsi pengawasan eksternal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin mengetahui dan mencoba melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

4. Apakah Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui Belanja Daerah berpegaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada proses pembelajaran di kampus serta dengan adanya penelitian ilmu dan wawasan penulis dapat bertambah.

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kinerja Keuangan melalui Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai pedoman maupun referensi dalam penulisan atau penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan proposal ini merupakan garis besar dari penyusunan pemikiran untuk memahami keseluruhan isi proposal, sistematika dari proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori dari masing-masing variabel penelitian ,yaitu kinerja keuangan, pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan dana perimbangan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, operasional variabel dan pengukuran variabel serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran baik untuk peneliti selanjutnya ataupun untuk tempat penelitian dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja Keuangan

Berdasarkan pasal 1 ayat 32 PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, yaitu dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Di pihak lain, kinerja non-keuangan dapat dilihat dari kualitas pelayanan, kedisiplinan, kepuasan pelanggan dan sebagainya.

Pengukuran kinerja keuangan merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria sebelumnya. dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan

alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin isien, begitu pula sebaliknya. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) maksimal dengan menggunakan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menjumlahkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio desentralisasi fiskal (Pratiwi 2018). Mahmudi (2016;140), mengungkapkan pengukuran kinerja keuangan pemerintah adalah :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah Mahmudi (2016;140). Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016;140) adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer pusat}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ektern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Rumus perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016: 140) adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Total Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat, yaitu ditunjukkan dengan melihat perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total

penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal dapat diketahui bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan PAD sebagai sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Rumus perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal menurut Mahmudi (2016:140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pengukuran variabel Kinerja Keuangan, menggunakan pengukuran yang dipakai oleh (Pratiwi, 2018)

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari penerimaan pajak bersumber dari dalam daerah yang berhubungan guna membiayai kegiatan daerah tersebut yang bersumber pendapatan daerah terdiri pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa PAD adalah

pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah yang bersumber dari pajak maupun non pajak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Prasasti and Sari, 2015).

Pengertian PAD menurut beberapa para ahli Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya, Carunia (2017).

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai pendapatan, telah dikemukakan beberapa definisi mengenai pendapatan daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) mendefinisikan bahwa pendapatan sebagai semua penerimaan rekening Kas Umum Negara dan Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

2.2.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memaparkan bahwa PAD dapat dibagi menjadi empat kelompok, (Ayu, 2018) yaitu :

1. Pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini berlaku untuk wajib pajak seperti orang atau badan usaha dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti perhotelan, rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, dll.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan langsung yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa/fasilitas umum milik daerah seperti retribusi Kebersihan, pemakaman, pengolahan limbah, dll.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba BUMN, bagian laba perusahaan milik swasta.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan daerah yang dihasilkan dari penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki empat jenis yang dikategorikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Retribusi daerah, yaitu pungutan langsung yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa/fasilitas umum milik daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba BUMN, bagian laba perusahaan milik swasta. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan daerah yang dihasilkan dari penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

2.2.3 Komponen-Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut (Putri, 2015) Komponen PAD terdiri atas :

1. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).
2. Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009).
3. Laba BUMD atau Bagian Laba Usaha Daerah adalah Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah adalah Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan milik pemerintahan daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba BUMD.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa komponen – komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari, Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Laba BUMD, pendapatan Asli Daerah lain – lain yang sah.

Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Laba BUMD atau Bagian Laba Usaha Daerah adalah Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah adalah Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan milik pemerintahan daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba BUMD.

2.2.4 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 dalam penelitian (Pratiwi, 2018) kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2010:9). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, Mardiasmo (2011: 6). Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak II (Pajak Kabupaten/Kota) dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, Resmi (2011:8). Berdasarkan tiga pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan Air

b. Pajak Daerah Kabupaten

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Hiburan
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi disebut sebagai *user charge*, *user face*, atau *charging for service*. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan atau kontraprestasi langsung yang dinikmati pembayar retribusi.

5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.

- c. Pendapatan bunga.
- d. Tuntutan ganti rugi.
- e. Komisi.
- f. Potongan.
- g. Keuntungan selisih kurs.
- h. Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- i. Pendapatan denda pajak dan retribusi.
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Untuk mengetahui jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat diketahui dari penjumlahan rumus yang digunakan oleh Pratiwi (2018), yaitu:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}$$

(Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah diambil dari data Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tanpa menghitung sendiri yang diambil dari website BPS Sumatera Barat)

2.3 Belanja Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 13 PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran berkenaan. Menurut UU No. 32/2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah belanja daerah dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang mewujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Menurut Pasal 49 ayat 1 PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah mempunyai fungsi mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pada ayat 2 Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat 3 dan 4 Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Menurut pasal 55 ayat 1 menjelaskan jenis-jenis dari belanja daerah adalah Belanja Daerah terdiri :

- a. belanja operasi
- b. belanja modal
- c. belanja tidak terduga
- d. belanja transfer.

Untuk menghitung belanja daerah dapat diketahui dari rumus yang dipakai oleh Mahmudi (2010;166) yaitu:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

(Dalam penelitian ini Belanja Daerah diambil dari data Laporan Realisasi Belanja Daerah tanpa menghitung sendiri yang diambil dari website BPS Sumatera Barat)

2.4 Dana Perimbangan

2.4.1 Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. Dana perimbangan merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana

perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan fungsi pengawasan eksternal. UU No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19, menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan Pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Dana perimbangan dihitung dengan perbandingan antara dana perimbangan dengan total pendapatan.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (Darise, 2018:137). Dalam Undang-Undang

Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Disebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, Djaenuri (2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Sejalan dengan tujuan pokoknya, Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2.4.2 Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas.

a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.

b. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
- 2) 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.

c. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan

negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah, (Pratiwi, 2018). Fungsi Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kapasitas fiskal. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dasar hukum yang mengatur Dana Alokasi khusus adalah Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah.

Untuk mengetahui jumlah dana perimbangan, dapat diketahui dari penjumlahan rumus yang digunakan oleh Pratiwi (2018) yaitu:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil (DBH)} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)}$$

(Dalam penelitian ini Dana Perimbangan diambil dari data Laporan Realisasi Dana Perimbangan tanpa menghitung sendiri yang diambil dari website BPS Sumatera Barat)

2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini, berikut ini penjabaran dari peneliti terdahulu yang dijadikan sumber referensi oleh penulis, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuriko Feridan (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah	Independen : 1. Pendapatan Asli Daerah (X1) 2. Dana Perimbangan (X2), 3. Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (X3) Dependen : Belanja Daerah (Y)	Hasil dari penelitian tersebut analisis pengaruh PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah adalah sebagai berikut: 1. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah artinya jika PAD meningkat maka belanja daerah juga meningkat. 2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah artinya jika dana perimbangan meningkat maka belanja daerah juga meningkat. 3. Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah artinya jika lain-lain pendapatan yang sah meningkat maka belanja daerah juga meningkat
2.	Armaja, Ridwan Ibrahim, Aliamin (2015)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)	Independen : 1. Kekayaan Daerah (X1), 2. Dana Perimbangan (X2), 3. Belanja Daerah (X3) Dependen : Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh (Y)	Dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.
3.	Tungki Ariwibowo (2015)	Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Dengan	Independen : 1. Dana Perimbangan (X1), 2. Belanja Daerah (X2)	Hasil analisis diperoleh bahwa: 1. Ada pengaruh yang negatif dan signifikan dana perimbangan

		Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi	<p>3. Kinerja Keuangan (X3)</p> <p>Dependen : Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi (Y)</p>	<p>terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013.</p> <p>2. Ada pengaruh yang negatif dan signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013.</p> <p>3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013.</p> <p>4. Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013, terbukti kebenarannya.</p> <p>5. Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013, terbukti kebenarannya.</p>
4.	Purwasih (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	<p>Independen :</p> <p>1. Pendapatan Asli Daerah (X1),</p> <p>2. Dana Perimbangan (X2)</p> <p>3. Belanja Modal (X3)</p> <p>Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>1. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY, dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien positif sebesar 0,0000005556. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Dana perimbangan</p>

				<p>berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY, dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai koefisien negatif sebesar $-0,0000001218$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah menunjukkan Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rendahnya tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatannya akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY, dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,091 > 0,05$ dan nilai koefisien negatif sebesar $-0,0000002019$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
5.	Tri Yuni Pratiwi (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (X1), 2. Dana Perimbangan (X2) 3. Belanja Modal (X3) <p>Dependen :</p> <p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016</p>	<p>Hasil penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

			(Y)	<p>Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.</p> <p>2. Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.</p> <p>3. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.</p> <p>4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.</p>
6.	Wahono (2018)	Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera	<p>Independen :</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)</p> <p>Dependen :</p> <p>Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera (Y)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari unsur unsur PAD yaitu:</p> <p>1. Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera.</p> <p>2. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Penerimaan retribusi yang tinggi mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.</p> <p>3. Pengelolaan Kekayaan</p>

				<p>Daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera.</p> <p>4. Lain-lain pendapatan yang Sah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera, Penerimaan Lain-lain pendapatan Sah yang tinggi mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah yang baik.</p>
7.	Ni Putu Gina Sukma Antari (1) Ida Bagus Panji Sedana (2) (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (X1) 2. Belanja Modal (X2) <p>Dependen :</p> <p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015 mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Hasil ini memberikan arti bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015 belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.</p>
8.	Ni Ketut Ayu Anggreni1, Luh	Pengaruh Pad (X1), Dana Perimbangan	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pad (X1), 	<p>hasil analisis yang didapatkan</p>

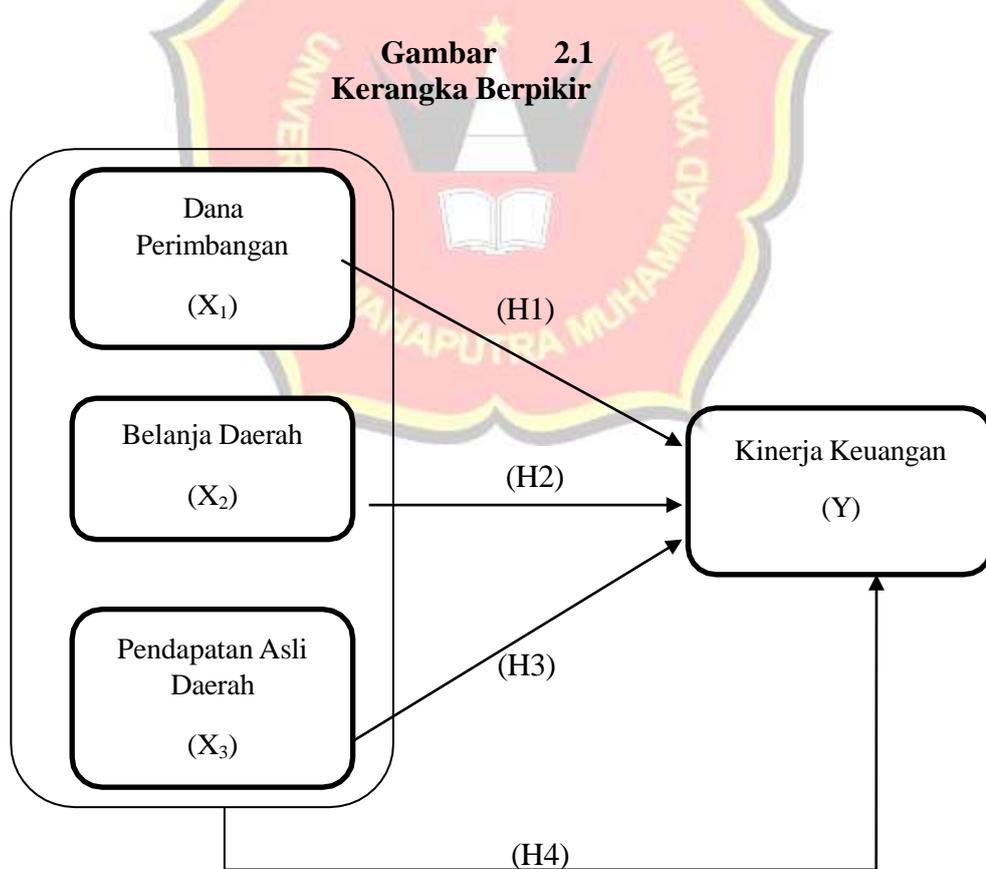
	Gede Sri Artini2 (2018)	(X2) Dan Belanja Modal (X3) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali (Y)	<p>2. Dana Perimbangan (X2),</p> <p>3. Belanja Modal (X3)</p> <p>Dependen : Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali (Y)</p>	<p>sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Semakin tinggi PAD semakin baik kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. 2. Dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Semakin tinggi pada dana perimbangan, kinerja keuangan pemerintah daerah menurun namun tidak signifikan mempengaruhi. 3. Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Semakin tinggi belanja modal menyebabkan kinerja keuangan daerah kabupaten Badung menurun. Berdasarkan
9.	Sealys Harie Saputri (2020)	Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Perimbangan (X1), 2. Belanja Daerah (X2), 3. Pendapatan Asli Daerah (X3) <p>Dependen : Kinerja Keuangan Daerah (Y)</p>	<p>Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: \</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, artinya semakin tinggi nilai transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya. 2. Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, artinya semakin meningkatnya alokasi belanja daerah, maka semakin menurunnya kinerja keuangan daerah. Meningkatnya biaya yang dialokasikan belanja

				<p>daerah tidak diimbangi dengan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan infrastruktur yang memadai untuk kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, artinya semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, semakin tinggi pula kinerja keuangan daerah. Tingginya pendapatan asli daerah yang dihasilkan berarti PAD mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.</p>
10	Yoshinta Endah Wahyuningsih (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) 2. Dana Perimbangan (X2) <p>Dependen :</p> <p>Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>	<p>hasil analisis dalam penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah periode 2011 – 2013, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai thitung sebesar - 0.163 lebih besar dari ttabel sebesar 2.368 dan nilai signifikan statistik t untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,871. Nilai signifikan $0,871 > \alpha$ 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Dengan demikian, H1 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. 2. Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai thitung sebesar - 2.275 lebih besar dari ttabel sebesar -2.368 dan nilai signifikan statistik t untuk variabel

				Dana Perimbangan sebesar 0,025. Nilai signifikan $0,025 < \alpha 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Dengan demikian, H2 menyatakan bahwa
--	--	--	--	--

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu yang mengenai apa yang diteliti dan dituangkan dalam sebuah bagan menjadi jalur pemikiran penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel independen yaitu variabel Dana Perimbangan (X_1), Belanja Daerah (X_2), Pendapatan Asli Daerah (X_3) terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan (Y). Maka dalam penelitian ini dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengembangan kegiatan atau program masing-masing daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tujuan pemberian dana perimbangan ini utamanya pemertaaan seluruh daerah yang ada di Indonesia dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, demografis, dan tingkat pendapatan. Kinerja keuangan daerah merupakan hasil output yang penggunaannya harus dilakukan pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja untuk mengetahui apakah pelaksanaan yang telah direncanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari setiap tahunnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi, Hamid (2018). Anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk daerah tergantung dari seberapa besar daerah tersebut membutuhkan dana serta dilihat dari berbagai prepektif termasuk kondisi demografis setiap daerahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian Nugroho dan Prasetyo (2018) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

yang berarti semakin tinggi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka semakin baik pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga akan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah yang baik. Penelitian tersebut juga didukung oleh Kusrina (2014) dan Muhayannah (2016) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Alasan tidak berpengaruhnya Dana Perimbangan dikarenakan Pemerintah Daerah mampu mengelola secara maksimal dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kebutuhan daerah.

Namun penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian Andirfa (2016) menyatakan bahwa secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya semakin besar jumlah penerimaan transfer dana perimbangan maka semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat, serta penelitian Budiarto dan Alexander (2016) dan Ayu (2018) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, artinya besaran dari alokasi belanja daerah sebagian besar dikeluarkan oleh dana perimbangan. Berdasarkan teori diatas, maka dapat ditarik hipotesis pertama sebagai berikut:

H_1 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

2.7.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun berjalan. Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Selain itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Belanja merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem APBD berbasis kinerja. Kualitas APBD adalah bagian dari kinerja pemerintah daerah, karena mencerminkan bagaimana daerah itu membelanjakan uangnya dengan baik dan benar. Belanja daerah memiliki standar pelayanan minimal yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat konsumen dari pelayanan itu sendiri dalam menentukan seberapa besar anggaran yang harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Total belanja yang besar membuat kinerja keuangan daerah semakin tidak baik karena adanya kemungkinan pengeluaran yang lebih banyak bersifat rutin dibandingkan belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian Renas dan Muid (2014) menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Furqan dan Hilda (2015) menyatakan bahwa realisasi belanja daerah

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah dimana terdapat kecenderungan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan belanja daerah melebihi target anggaran yang telah ditetapkan, hal ini berpengaruh terhadap penurunan kinerja keuangan daerah. Namun penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Armaja et al (2015) yang menunjukkan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, ketika alokasi belanja daerah meningkat maka semakin tinggi juga pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat hal tersebut akan berpengaruh positif skor kinerja pemerintah daerah tersebut dan penelitian Retnowati (2016) menunjukkan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₂ : Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

2.7.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi wilayah yang dipungut sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. PAD sebagai tulang punggung dalam pembiayaan daerah yang memiliki kontribusi terhadap APBD dengan pemahaman, semakin tinggi pendapatan daerah yang dihasilkan maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah dianggap mampu dalam membangun daerahnya sendiri dan dapat memungkinkan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan kegiatan daerah tanpa tergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah memiliki

peran yang cukup signifikan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Liando, 2017: 36).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong peningkatan investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik dan diikuti investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyani, 2012). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Darwanis dan Saputra (2014) menyatakan adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti tingginya PAD akan sangat mendukung pertumbuhan kinerja keuangan.

Penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015) dan Budianto dan Alexander (2016) juga menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Antari dan Sedana (2018) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingginya PAD mampu meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

2.7.4 Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengembangan kegiatan atau program masing-masing daerah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berjalan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi wilayah yang dipungut sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Hasil penelitian dari Sari (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan hasil penelitian dari Retnowati (2016) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian dari Abdullah dan Febriansyah (2015) dan Budianto dan Alexander (2016) juga menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian dari Kusrina (2014) dan Muhayanah (2016) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian dari Mustikarini dan Fitriasari (2012) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hal

tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₄ : Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. dengan pendekatan asosiatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan di analisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika (Sekaran, 2017;76). Penelitian ini bersifat asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat, dimana penelitian ini mencari pengaruh variabel bebas (independen) Pengaruh Dana Perimbangan (X1), Belanja Daerah (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3) terhadap variabel terikat (dependen) Kinerja Keuangan (Y).

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2011;64). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berjumlah 19 kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Ini terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi, dengan kata lain, beberapa, tapi tidak semua,

elemen populasi dari sampel (Sekaran, 2013;241). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah desain terbatas untuk orang-orang spesifik yang dapat memberikan informasi yang diperlukan karena hanya mereka yang memiliki informasi atau memenuhi kriteria yang ditetapkan penelitian (Sekaran, 2013;252). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat yang dinyatakan dalam bentuk angka di BPS Sumatera Barat, selama tahun pengamatan yaitu 2017 – 2020.

Berikut daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat:

1. Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kabupaten Solok
4. Kabupaten Sijunjung
5. Kabupaten Tanah Datar
6. Kabupaten Padang Pariaman
7. Kabupaten Agam
8. Kabupaten Limapuluh Kota
9. Kabupaten Pasaman
10. Kabupaten Solok Selatan
11. Kabupaten Dharmasraya
12. Kabupaten Pasaman Barat
13. Kota Padang
14. Kota Solok



15. Kota Sawahlunto
16. Kota Padang Panjang
17. Kota Bukittinggi
18. Kota Payakumbuh
19. Kota Pariaman

3.3 Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder biasanya berbentuk catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011;76).

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, menggandakan, mengcopy, membaca, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder biasanya berbentuk catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011;76). yaitu Data keuangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. (<http://sumbar.bps.go.id/>).

3.4 Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat berbeda atau bervariasi nilai (Sekaran, 2013;68). Variabel dibedakan menjadi variabel independen dan dependen :

1. Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini yaitu : Dana Perimbangan (X1), Belanja Daerah (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (X3).
2. Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Terdapat satu variabel dependen dalam penelitian ini yaitu : Kinerja Keuangan (Y).

3.5 Defenisi Operasional Variabel

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini dan menghindari kesalahan dalam penafsiran pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasional variabel yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Operasional	Pengukuran	Satuan
1.	Dana Perimbangan (X1)	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Djaenuri, (2012)	Dana Bagi Hasil (DBH) + Dana Alokasi Umum (DAU) + Dana Alokasi Khusus (DAK) = Dana Perimbangan Pratiwi, (2018) (Dalam penelitian ini Dana Perimbangan diambil dari data Laporan Realisasi Dana Perimbangan tanpa menghitung sendiri. Data tersebut diambil dari website BPS Sumatera Barat)	Rupiah
2.	Belanja Daerah (X2)	Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (PSAP No.2 Paragraf 7)	Realisasi Belanja – Anggaran Belanja = Belanja Daerah (Mahmudi, 2010;166) (Dalam penelitian ini Belanja Daerah diambil dari data Laporan Realisasi Belanja Daerah tanpa menghitung sendiri. Data tersebut diambil dari website BPS Sumatera Barat)	Rupiah
3.	Pendapatan Asli Daerah (X3)	Semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Halim, (2013)	Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah = Pendapatan Asli Daerah Pratiwi, (2018) (Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah diambil dari data Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tanpa menghitung sendiri. Data tersebut diambil dari website BPS Sumatera Barat)	Rupiah
4.	Kinerja Keuangan (Y)	Suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. (PP Nomor 8 Tahun 2006)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah + Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah + Rasio Desentralisasi Fiskal = Kinerja Keuangan (Mahmudi,2016;140)	Angka Persen

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan aplikasi SPSS Versi 25. SPSS merupakan program komputer yang terpakai untuk analisis statistika. SPSS memberikan teknologi kepada pengguna grafik dan visualisasi atraktif guna membantu dengan analisis mereka dan untuk memastikan mereka mengumpulkan informasi jelas dan benar dari data statistik mereka. SPSS dapat memberikan teknologi pengolahan data seperti statistik deskriptif, regresi, dan lain – lain.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2018;19). Yang termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, garfik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, *mean* (rata – rata), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata – rata dan standar deviasi, perhitungan persentase.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Tahapan pertama pelaksanaan analisis pada penelitian ini melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier*

Unbiased Estimator). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal dimana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji normalitas, Uji multikolinieritas, Uji heteroskedastisitas, dan Uji autokorelasi (Ghozali 2018;175).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penggunaan atau residual memiliki distribusi normal, Ghozali (2018;161). Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non prametik *Kolmogorov Smirnov Test* terhadap data yang dihasilkan. Pengujian normalitas dilakukan dengan menilai probabilitas melalui pengukuran tingkat signifikan 5%. Dalam pengujian *Kolmogorov Smirnov Test*, data yang dikatakan berdistribusi normal apabila :

1. Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* besar dari 0,05 atau 5% dikatakan normal
2. Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* kecil dari 0,05 atau 5%, maka data berdistribusi tidak normal.

Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* merupakan nilai yang digunakan untuk pengujian nilai *probability* atau *p-value* untuk memastikan bahwa distribusi teramati tidak akan menyimpang secara signifikan dari distribusi yang diharapkan di kedua ujung *two-tailed distribution*.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), Ghozali (2018;107). Data yang baik dalam uji ini adalah tidak ada multikolonieritas. Efek dari multikolonieritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar *error* besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t_{hitung} akan bernilai kecil dari t_{tabel} . Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolonieritas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *Tolerance* mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/tolerance$, dan menunjukkan terdapat kolonieritas yang tinggi. Nilai *cut off* yang digunakan adalah untuk nilai *tolerance* 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10. Model yang baik adalah tidak terjadi multikolonieritas. Berikut kriterianya :

1. Nilai *tolerance* : $Tolerance \leq 0,10$ (tidak terjadi multikolonieritas).

$Tolerance = 0,10$ (terjadi multikolonieritas).

2. Nilai VIF : $VIF \geq 10,00$ (tidak terjadi multikolonieritas).

$VIF = 10,00$ (terjadi multikolonieritas)

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018;137). Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varians dari residual satu pengamatan berbeda, disebut heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Dengan kriteria :

1. Apabila $Sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
2. Apabila $Sig < 0,05$ maka terdapat gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya), (Ghozali, 2018;111). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena gangguan pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu)

dan tidak perlu dilakukan pada data *cross section* seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan pada saat bersamaan. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi dapat dilihat dari kriteria nilai *Durbin-Watson* (DW) (Ghozali, 2018;112) yaitu :

Dengan:

H_0 = tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a = ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis tentang kekuatan variabel penentu (*independent variable*) terhadap pemanfaatan informasi kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda. Menurut Umar (2010;126) analisa regresi linear berganda adalah analisa tentang hubungan antara satu *dependent variable* dengan dua atau lebih *independent variable*. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kinerja keuangan.

X₁ = Dana Perimbangan.

X₂ = Belanja Daerah.

X₃ = Pendapatan Asli Daerah

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi.

a = Konstanta.

e = *error* .

3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan atau memperjelas dari tujuan semula yaitu apakah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Imam Ghozali (2018;97) dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan. (Ghozali, 2018;98) mengatakan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriterianya dikutip dari (Nanang Martono, 2014;171) adalah :

- a. Jika $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$ maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

b. Jika $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$ dan maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Untuk pengujian signifikansinya pada 0,05 ($\alpha=5\%$) dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Nanang Martono, 2014;171) adalah :

a. Jika nilai signifikan $\text{sig} \leq 0,05$ maka hipotesis teruji yang berarti variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

b. Sebaliknya Jika signifikan $\text{sig} \geq 0,05$ maka hipotesis tidak teruji yang berarti variabel independen (X) berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Y).

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau *joint* mempengaruhi variabel independen (Ghozali,2018;179). Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$ untuk *degree of freedom* (df)= n-k-1. Uji ini dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Nanang Martono, 2014;171) adalah :

a. Jika nilai $|F_{hitung}| \geq F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

b. Jika nilai $|F_{hitung}| \leq F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Untuk pengujian signifikansinya pada 0,05 ($\alpha=5\%$) dilakukan dengan kriteria dikutip dari (Nanang Martono, 2014;171) adalah :

- a. Jika nilai signifikan $\text{sig} \leq 0,05$ maka hipotesis teruji yang berarti variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- b. Sebaliknya Jika signifikan $\text{sig} \geq 0,05$ maka hipotesis tidak teruji yang berarti variabel independen (X) secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Y).

3.6.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018;97). Apabila teknik analisisnya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas kita menggunakan R^2 tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari dua variabel maka akan lebih baik menggunakan *adjusted* R^2 yang nilainya selalu lebih kecil dari R^2 (Ghozali, 2018;97).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat dan teknik analisa data untuk koefisien determinasi yang peneliti gunakan adalah *Adjusted* R^2 .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Sumatera Barat

Sumatera Barat adalah Propinsi yang mempunyai sejarah panjang, dimana setiap sejarahnya mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Minangkabau. Suku ini merupakan salah satu suku yang terkenal dengan cerita rakyatnya yang begitu melegenda diseluruh tanah air. Suku Minang berada di Sumatera Barat salah satu Provinsi yang terletak di sepanjang pesisir pulau Sumatera. Padang sebagai ibu kota Sumatera Barat dikenal dengan masakannya yang khas dan dominan bumbu asli dari rempah – rempah Indonesia.

Propinsi dengan jumlah penduduk 4.864.909 jiwa ini memang dominan dihuni oleh masyarakat yang beretnis Minang, karena itu wajar saja jika Sumatera Barat dikenal lewat suku Minangkabau. Melirik sejarah singkat Minangkabau, merupakan salah satu desa yang berada dikawasan Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Desa tersebut awalnya merupakan tanah lapang. Namun karena adanya isu yang berkembang bahwa kerajaan Pagaruyuang akan diserang kerajaan Majapahit dari daerah Jawa maka terjadilah peristiwa adu kerbau atas usul kedua belah pihak. Kerbau tersebut mewakili berperangan kedua kerajaan. Karena kerbau Minang berhasil memenangkan perkelahian maka muncul kata manang kerbau yang selanjutnya dijadikan nama Nagari atau desa tersebut.

Tahun 1949 Provinsi Sumatera mengalami perpecahan menjadi 3 kawasan yakni Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah yang mencakup Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Suku dan Bahasa yang digunakan Sumatera Barat, Penduduk Sumatera Barat dihuni oleh mayoritas oleh suku Minangkabau. Selain suku Minang, diwilayah Pasan dihuni oleh Suku Mandailing dan suku Batak. Awal munculnya penduduk suku tersebut pada abad ke 18 masa Perang Paderi. Daerah Padang Gelugur, Luang Silaut dan Sitiung yang merupakan daerah transmigrasi terdapat juga suku Jawa. Sebagian di daerah tersebut terdapat penduduk Imigran keturunan Suriname yang kembali memilih pulang ke Indonesia pada akhir 1950 an. Para imigran tersebut ditempatkan di daerah Sitiung. Mayoritas penduduk suku Mentawai juga berdomisili di kepulauan Mentawai dan sangat jarang di temui penduduk suku Minangkabau. Beberapa suku lainnya seperti etnis Tionghoa memilih menetap di Kota – kota besar seperti Bukittinggi, Padang dan Payakumbuh. Suku Nias dan Tamil sendiri berada di daerah Pariaman dan Padang walaupun dalam jumlah yang sedikit.

Berikut daftar nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan urutan pemekaran :

1. Berdasarkan UU No. 16 tahun 1948 pasal 1 ayat 1 tentang Penetapan Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau
 1. Kabupaten Agam
 2. Kabupaten Padang Pariaman

3. Kabupaten Solok
 4. Kota Pariaman
 5. Kabupaten Sijunjung
 6. Kabupaten Limapuluh Kota
 7. Kabupaten Pesisir Selatan
 8. Kabupaten Tanah Datar
 9. Kota Padang
 10. Kota Sawahlunto
 11. Kota Padang Panjang
 12. Kota Bukittinggi
2. Berdasarkan Pasal 1, Permendagri No. 8 tahun 1970 pasal 1 tentang pembentukan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh :
13. Kota Solok
 14. Kota Payakumbuh
3. Berdasarkan Pasal 3, UU No. 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai:
15. Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Berdasarkan Pasal 3, UU No. 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman:
16. Kota Pariaman
5. Berdasarkan Pasal 3, UU No. 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat:
17. Kabupaten Dharmasraya

6. Berdasarkan Pasal 4, UU No. 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat:

18. Kabupaten Solok Selatan

7. Berdasarkan Pasal 5, UU No. 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat:

19. Kabupaten Pasaman Barat

4.1.2 Geografis Sumatera Barat

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis 00 54' Lintang Utara sampai dengan 30 30' Lintang Selatan serta 980 36' sampai dengan 1010 53' Bujur Timur dengan total luas wilayah sekitar 42.297,30 Km² atau 4.229.730 Ha termasuk ± 391 pulau besar dan kecil di sekitarnya.

Secara administratif, wilayah Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu.
3. Sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.
4. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

4.1.3 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2020, yang diperoleh langsung dari Website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 76

sampel (19 x 4 tahun). Berikut daftar nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data BPS Sumatera Barat:

Tabel 4.1
Daftar Sampel

No	Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2	Kabupaten Pesisir Selatan
3	Kabupaten Solok
4	Kabupaten Sijunjung
5	Kabupaten Tanah Datar
6	Kabupaten Padang Pariaman
7	Kabupaten Agam
8	Kabupaten Limapuluh Kota
9	Kabupaten Pasaman
10	Kabupaten Solok Selatan
11	Kabupaten Dharmasraya
12	Kabupaten Pasaman Barat
13	Kota Padang
14	Kota Solok
15	Kota Sawahlunto
16	Kota Padang Panjang
17	Kota Bukittinggi
18	Kota Payakumbuh
19	Kota Pariaman
Jumlah	19 Kabupaten/Kota
Total (4 Tahun)	76 Kabupaten/Kota

4.2 Hasil Analisis Data

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan bantuan program aplikasi SPSS (*Statistic Product and Service Solutions*) versi 25.0. Analisis data dan hasil pengolahan data penelitian dijelaskan sebagai berikut :

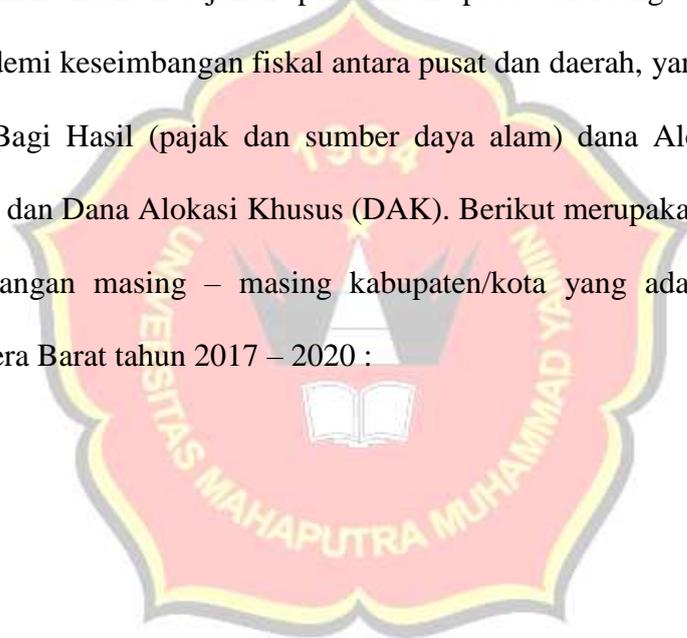
4.2.1 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data dari Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2020. Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2020

tersebut diperoleh langsung dari Website Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat ([Http://bps.sumbar.go.id](http://bps.sumbar.go.id)). Yang lokasi kantornya Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang, Sumatera Barat 25135, Telp (0751) 442158, 442160, Mailbox : sumbar@bpsgo.id atau pst1300@bps.go.id.

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut merupakan daftar dana perimbangan masing – masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 – 2020 :



Tabel 4.2
Data Dana Perimbangan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
(X1) Periode 2017 – 2020 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	731.385.235.580	776.846.474.070	818.830.711.080	800.809.146.000
2	Kabupaten Pesisir Selatan	1.109.254.189.930	1.120.389.365.020	1.213.725.540.000	1.243.067.977.000
3	Kabupaten Solok	911.897.537.820	936.193.160.460	980.735.199.200	972.973.643.220
4	Kabupaten Sijunjung	710.605.073.000	700.524.758.000	737.765.488.570	675.595.794.000
5	Kabupaten Tanah Datar	928.980.499.000	944.906.738.000	984.486.247.000	992.118.633.000
6	Kabupaten Padang Pariaman	1.059.564.099.180	1.087.053.036.000	1.139.643.299.240	1.144.196.529.000
7	Kabupaten Agam	1.078.038.916.000	1.092.066.031.000	1.143.589.672.000	1.198.855.509.000
8	Kabupaten Limapuluh Kota	992.052.783.000	997.618.221.000	1.016.024.131.820	1.070.332.801.250
9	Kabupaten Pasaman	767.064.865.460	755.591.287.380	784.976.915.140	818.742.944.000
10	Kabupaten Solok Selatan	641.966.526.860	636.215.119.810	695.366.633.770	744.501.081.000
11	Kabupaten Dharmasraya	696.906.890.930	708.972.421.760	761.630.742.880	803.020.617.370
12	Kabupaten Pasaman Barat	835.170.390.500	887.119.463.270	919.575.539.340	956.013.710.370
13	Kota Padang	1.360.290.810.170	1.427.702.319.550	1.524.369.870.000	1.542.219.925.000
14	Kota Solok	472.503.110.000	481.477.263.000	508.925.258.580	493.691.086.000
15	Kota Sawahlunto	467.157.187.000	458.504.259.000	495.141.841.000	508.874.543.000
16	Kota Padang Panjang	439.519.041.000	442.112.700.000	453.085.922.600	457.677.364.370
17	Kota Bukittinggi	516.228.868.600	523.061.869.000	552.063.924.510	552.771.328.950
18	Kota Payakumbuh	596.081.338.110	565.250.189.020	609.589.230.920	579.307.233.000
19	Kota Pariaman	515.176.988.200	509.927.165.550	526.296.352.130	484.377.306.840

Sumber : *Laporan Realisasi APBD Sumatera Barat (2017-2020) – Lampiran 1*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dana perimbangan pada tahun 2017 tertinggi adalah Kota Padang sebesar Rp. 1.360.290.810.170 dan terendah adalah pada Kota Padang Panjang sebesar Rp. 439.519.041.000.

Pada tahun 2018, terjadi penurunan dana perimbangan untuk Kabupaten/Kota yaitu pada Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 755.591.287.380, Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 700.524.758.000, Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 636.215.119.810, Kota Pariaman sebesar Rp. 509.927.165.550, Kota Payakumbuh sebesar Rp.

565.250.189.020, dan Kota Sawahlunto sebesar Rp. 458.504.259.000, peningkatan terus terjadi pada Kota Padang sebesar Rp. 1.427.702.319.550.

Pada tahun 2019 dana perimbangan mengalami peningkatan menyeluruh setiap Kabupaten/Kota dan peningkatan tertinggi adalah Kota Padang sebesar Rp. 1.524.369.870.000.

Pada tahun 2020 dana perimbangan mengalami penurunan lagi pada Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 800.809.146.000, Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 675.595.794.000, Kabupaten Solok sebesar Rp. 972.973.643.220, Kota Pariaman sebesar Rp. 484.377.306.840, Kota Payakumbuh sebesar Rp. 579.307.233.000, Kota Solok sebesar Rp. 493.691.086.000, dan kota yang tertinggi adalah Kota Padang sebesar Rp. 1.542.219.925.000.

Kenaikan dan penurunan dana perimbangan daerah tergantung dari perolehan dana bagi hasil yang bersumber dari pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi seperti kewenangan mengelola sumber daya alam sendiri untuk meningkatkan perekonomian daerah, pengaturan pembangunan di daerah, dan lain-lain, jumlah pengalokasian DAU dan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang bersumber dari APBN.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Berikut merupakan daftar Belanja Daerah masing – masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 – 2020 :

Tabel 4.3
Data Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (X2)
Periode 2017 – 2020 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.011.688.194.890	900.575.703.010	987.162.174.110	1.019.432.615.020
2	Kabupaten Pesisir Selatan	1.507.585.932.640	1.569.020.950.590	1.693.639.524.000	1.854.122.929.690
3	Kabupaten Solok	1.176.599.853.200	1.167.465.763.910	1.247.720.963.300	1.262.524.496.560
4	Kabupaten Sijunjung	896.035.326.000	958.138.803.000	1.000.514.064.760	926.764.551.000
5	Kabupaten Tanah Datar	1.218.833.756.000	1.238.097.675.000	1.350.362.869.000	1.458.450.549.000
6	Kabupaten Padang Pariaman	1.414.773.624.150	1.409.350.454.000	1.444.556.894.030	1.493.629.132.000
7	Kabupaten Agam	1.396.921.201.000	1.387.560.260.000	1.507.715.256.000	1.557.010.916.000
8	Kabupaten Limapuluh Kota	1.258.249.159.000	1.244.907.868.000	1.362.116.350.440	1.455.355.562.910
9	Kabupaten Pasaman	999.002.451.400	981.817.133.900	1.012.301.501.110	1.116.938.658.380
10	Kabupaten Solok Selatan	822.917.429.050	788.835.587.430	867.437.319.240	952.575.457.910
11	Kabupaten Dharmasraya	935.591.361.570	931.599.585.820	1.036.553.410.710	1.102.724.580.350
12	Kabupaten Pasaman Barat	1.021.292.710.630	1.169.523.754.460	1.194.094.598.480	1.341.712.718.860
13	Kota Padang	2.077.455.348.190	2.177.863.598.830	3.081.739.853.000	2.745.995.435.000
14	Kota Solok	556.789.190.790	648.548.438.000	611.570.146.850	688.964.333.050
15	Kota Sawahlunto	587.085.097.000	582.394.701.000	622.472.823.000	682.764.181.000
16	Kota Padang Panjang	608.108.212.010	613.485.174.000	600.204.262.750	644.519.550.990
17	Kota Bukittinggi	590.688.034.800	705.251.103.000	717.087.566.900	996.015.381.340
18	Kota Payakumbuh	694.223.803.930	716.396.747.760	805.939.541.100	841.602.921.880
19	Kota Pariaman	641.311.903.000	634.781.641.160	703.463.292.080	684.679.152.630

Sumber : *Laporan Realisasi APBD Sumatera Barat (2017-2020)– Lampiran 2*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan belanja daerah pada tahun 2017 tertinggi adalah Kota Padang sebesar Rp. 2.077.455.348.190 dan terendah adalah pada Kota Solok sebesar Rp. 556.789.190.790.

Pada tahun 2018 pendapatan belanja daerah mengalami penurunan pada Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Agam sebesar Rp. 1.387.560.260.000, Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp.

931.599.585.820, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 900.575.703.010, Kabupaten Limapuluh Kota sebesar Rp. 1.244.907.868.000, Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp. 1.409.350.454.000, Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 981.817.133.900, Kabupaten Solok sebesar Rp. 1.167.465.763.910, Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 788.835.587.430, Kota Pariaman sebesar Rp. 634.781.641.160, Kota Sawahlunto sebesar Rp. 582.394.701.000, dan kota yang tertinggi adalah Kota Padang sebesar Rp. 2.177.863.598.830.

Pada tahun 2019 pendapatan belanja daerah mengalami penurunan pada Kabupaten/Kota yaitu Kota Padang Panjang sebesar Rp. 600.204.262.750, Kota Solok sebesar Rp. 611.570.146.850, dan pendapatan tertinggi adalah Kota Padang sebesar Rp. 3.081.739.853.000.

Pada tahun 2020 pendapatan belanja daerah mengalami penurunan pada Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 926.764.551.000, Kota Padang sebesar Rp. 2.745.995.435.000, Kota Pariaman sebesar Rp. 684.679.152.630, dan pendapatan tertinggi adalah Kota Padang sebesar Rp. 2.745.995.435.000.

Tinggi atau rendahnya belanja daerah suatu daerah dipengaruhi oleh kebutuhan masing – masing daerah. Daerah yang memiliki anggaran belanja daerah yang tinggi menandakan daerah tersebut memiliki kebutuhan yang lebih tinggi dari pada daerah lainnya, baik dari segi pembangunan, infrastruktur, sarana dan prasarana, dan lainnya.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari penerimaan pajak bersumber dari dalam daerah yang berhubungan guna membiayai kegiatan daerah tersebut yang bersumber pendapatan daerah terdiri pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut merupakan daftar Pendapatan Asli Daerah masing – masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 – 2020 :

Tabel 4.4
Data Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (X3) Periode 2017 – 2020 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	68.477.676.600	45.358.184.270	40.063.395.070	50.316.759.000
2	Kabupaten Pesisir Selatan	176.902.866.670	123.906.524.440	134.804.594.000	156.419.589.080
3	Kabupaten Solok	113.269.815.420	67.936.258.790	74.595.778.020	75.296.758.350
4	Kabupaten Sijunjung	107.915.721.000	79.055.940.000	83.906.454.920	58.785.769.000
5	Kabupaten Tanah Datar	172.812.023.000	115.914.188.000	129.785.828.000	165.000.448.000
6	Kabupaten Padang Pariaman	141.310.805.690	84.472.664.000	101.607.521.620	109.467.232.000
7	Kabupaten Agam	161.539.091.000	99.684.205.000	123.658.589.000	125.059.320.000
8	Kabupaten Limapuluh Kota	119.771.917.000	73.442.509.000	85.168.153.330	100.575.904.210
9	Kabupaten Pasaman	142.748.233.330	100.054.438.440	98.595.691.290	95.921.682.400
10	Kabupaten Solok Selatan	75.588.033.100	60.545.296.360	67.842.785.840	70.918.707.160
11	Kabupaten Dharmasraya	98.937.393.390	84.116.203.860	78.882.919.150	104.794.164.000
12	Kabupaten Pasaman Barat	158.920.863.870	158.872.998.660	104.052.818.020	142.978.775.350
13	Kota Padang	548.653.179.270	487.834.642.410	546.108.570.000	881.995.807.000
14	Kota Solok	41.852.774.000	40.742.809.000	41.651.875.800	46.000.000.000
15	Kota Sawahlunto	63.082.759.000	47.227.132.000	57.170.994.000	61.765.679.000
16	Kota Padang Panjang	88.837.034.000	79.752.372.000	77.323.150.460	97.543.849.570
17	Kota Bukittinggi	102.022.621.330	101.936.793.000	111.896.596.610	151.437.934.800
18	Kota Payakumbuh	116.596.479.800	94.287.442.040	104.070.234.420	122.250.122.860
19	Kota Pariaman	30.881.846.110	32.213.303.040	36.665.174.230	33.787.684.140

Sumber : Laporan Realisasi APBD Sumatera Barat (2017-2020)– Lampiran 3

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode 2017 pendapatan asli daerah tertinggi adalah Kota Padang sebesar Rp. 548.653.179.270, sedangkan terendah adalah Kota Pariaman sebesar Rp. 30.881.846.110.

Pada tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Agam sebesar Rp. 99.684.205.000, Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp. 84.116.203.860, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 45.358.184.270, Kabupaten Limapuluh Kota sebesar Rp. 73.442.509.000, Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 100.054.438.440, Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp. 84.472.664.000, Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 158.872.998.660, Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 123.906.524.440, Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 79.055.940.000 dan kota yang tertinggi adalah Kota Padang sebesar Rp. 487.834.642.410.

Pada tahun 2019 pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp. 78.882.919.150, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 40.063.395.070, Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 98.595.691.290, Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 104.052.818.020, Kota Padang Panjang sebesar Rp. 77.323.150.460, dan pendapatan asli daerah tertinggi adalah Kota Padang sebesar Rp. 546.108.570.000.

Pada tahun 2020 pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sijunjung sebesar Rp.

58.785.769.000, Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 95.921.682.400, Kota Pariaman sebesar Rp. 33.787.684.140, dan pendapatan tertinggi adalah Kota Padang sebesar Rp. 881.995.807.000.

Tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula keputusan atau tindakan daerah dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Umumnya pendapatan Kabupaten/Kota sebagian besar berasal dari dana perimbangan, terutama diperoleh dari DAU. Sementara pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah masing-masing Kabupaten/Kota masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena masing-masing Kabupaten/Kota belum bisa mengelola kemampuan daerah lebih maksimal.

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja keuangan berupa hasil dari penjumlahan dari rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio desentralisasi fiskal. Berikut merupakan daftar data kinerja keuangan masing – masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 – 2020 :

Tabel 4.5
Data Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Y)
Periode 2017 – 2020 (Dalam Persen)

No	Kabupaten/Kota	Kinerja Keuangan			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	96,42	95,86	89,75	93,53
2	Kabupaten Pesisir Selatan	99,8	92,3	90,43	90,75
3	Kabupaten Solok	101,89	93,49	91,64	92,73
4	Kabupaten Sijunjung	98,9	93,89	93,61	94,9
5	Kabupaten Tanah Datar	100,5	98,42	96,18	103,1
6	Kabupaten Padang Pariaman	99,7	91,83	91,03	94,25
7	Kabupaten Agam	104,9	94,79	94,58	96,87
8	Kabupaten Limapuluh Kota	99,08	92,5	90,75	94,17
9	Kabupaten Pasaman	109,6	99,7	97,71	178,2
10	Kabupaten Solok Selatan	101,79	97,12	93,27	98,46
11	Kabupaten Dharmasraya	98	97,4	92,73	100,9
12	Kabupaten Pasaman Barat	111,7	110,1	96,01	100,5
13	Kota Padang	131,5	122,6	123,8	147,2
14	Kota Solok	94,95	100,66	97,54	97,63
15	Kota Sawahlunto	103,9	96,45	97,83	102,37
16	Kota Padang Panjang	109,5	112,2	108,6	114,4
17	Kota Bukittinggi	114,3	109,1	110,6	114,8
18	Kota Payakumbuh	115,8	109,6	106,5	110,3
19	Kota Pariaman	91,42	92,74	90,5	89,23

Sumber : *Data Diolah (2021) – Lampiran 4*

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan pada tahun 2017 tertinggi adalah Kota Padang sebesar 131,5%, sedangkan terendah adalah Kota Pariaman sebesar 91,42%. Kinerja Keuangan pada tahun 2018 mengalami penurunan pada Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Agam 94,79%, Kabupaten Dharmasraya sebesar 97,4%, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 95,86%, Kabupaten Limapuluh Kota sebesar 92,5%, Kabupaten Padang pariaman sebesar 91,83%, Kabupaten Pasaman sebesar 99,7%, Kabupaten Pasaman Barat sebesar 110,1%, Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 92,3%, Kabupaten Sijunjung sebesar 93,89%, Kabupaten solok sebesar 93,49%, Kabupaten Solok Selatan

sebesar 97,12%, Kabupaten Tanah Datar sebesar 98,42%, Kota Bukittinggi sebesar 109,1%, Kota Padang sebesar 122,6%, Kota Payakumbuh sebesar 109,6%, Kota Sawahlunto sebesar 96,45%, dan kinerja keuangan tertinggi adalah Kota Padang sebesar 122,6%.

Pada tahun 2019 Kinerja Keuangan mengalami penurunan kecuali Kabupaten/Kota yaitu Kota Bukittinggi sebesar 110,6%, Kota Padang sebesar 123,8%, Kota Sawahlunto sebesar 97,83% mengalami peningkatan kinerja keuangan, dan kinerja keuangan tertinggi adalah Kota Padang sebesar 123,8%. Pada tahun 2020 Kinerja Keuangan semuanya mengalami peningkatan kecuali Kota Pariaman sebesar 89,23%, dan Kinerja Keuangan tertinggi adalah Kota Padang sebesar 147,2%.

Meningkatnya atau menurunnya kinerja keuangan suatu pemerintah daerah disebabkan oleh belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap pemerintahan, bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus – menerus.

4.2.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, *mean* (rata – rata), perhitungan

desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata – rata dan standar deviasi, perhitungan persentase.

Tabel 4.6
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics								
	N	Range	Min	Max	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
X1	76	1103,0	439,0	1542,0	812,513	31,9755	278,7561	77704,946
X2	76	2525,0	556,0	3081,0	1103,618	54,2135	472,6223	223371,839
X3	76	851,0	30,0	881,0	121,224	14,6820	127,9949	16382,683
Y	76	88,97	89,23	178,20	101,9967	1,55513	13,55727	183,800
N	76							

Sumber : Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden (N) dari penelitian ini sebanyak 76 responden.

1. Variabel X1 memiliki nilai terkecil sebesar 439,0, nilai terbesar sebanyak 1542,0 dan nilai rata – rata sebanyak 812,513, serta nilai standar deviasinya sebesar 278,7561.
2. Variabel X2 memiliki nilai terkecil sebesar 556,0, nilai terbesar sebanyak 3081,0 dan nilai rata – rata sebanyak 1103,618, serta nilai standar deviasinya sebesar 472,6223.
3. Variabel X3 memiliki nilai terkecil sebesar 30,0, nilai terbesar sebanyak 881,0 dan nilai rata – rata sebanyak 121,224, serta nilai standar deviasinya sebesar 127,9949. Untuk Y memiliki nilai terkecil sebesar 89,23, nilai terbesar sebanyak 178,20 dan nilai rata – rata sebanyak 101,9967, serta nilai standar deviasinya sebesar 13,55727.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa data masing – masing variabel memiliki nilai *mean* (rata – rata) yang cukup tinggi yaitu

variabel X1 sebesar 278,7561, variabel X2 sebesar 472,6223, variabel X3 sebesar 127,9949, dan variabel Y sebesar 13,55727. Sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengolahan data dengan uji data berikutnya.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, dan uji autokolerasi.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penggunaan atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non prametik *Kolmogorov Smirnov Test* terhadap data yang dihasilkan. Pengujian normalitas dilakukan dengan menilai probabilitas melalui pengukuran tingkat signifikan 5%. Dalam pengujian *Kolmogorov Smirnov Test*, data yang dikatakan berdistribusi normal apabila :

1. Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* besar dari 0,05 atau 5% dikatakan normal.
2. Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* kecil dari 0,05 atau 5%, maka data berdistribusi tidak normal.

Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* merupakan nilai yang digunakan untuk pengujian nilai *probability* atau *p-value* untuk memastikan bahwa distribusi teramati tidak akan menyimpang secara signifikan dari distribusi yang diharapkan di kedua ujung *two-tailed distribution*.

Tabel 4.7
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Transform_RES
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	7,3294
	Std. Deviation	4,04418
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,073
	Negative	-,051
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : *Output diolah SPSS 25 (2021)*

Berdasarkan Berdasarkan tabel 4.7 yang telah disajikan di atas, besarnya nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,200. Apabila nilai signifikansi di atas 0,05 maka variabel-variabel secara statistic telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian, dapat diartikan bahwa nilai signifikansi sebsar $0,200 > 0,05$. Data variabel independen yaitu Dana Perimbangan (X1), Belanja Daerah (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (X3) memenuhi uji normalitas, dan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

4.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Efek dari multikolonieritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar *error* besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t_{hitung} akan bernilai kecil dari t_{tabel} . Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan

variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolonieritas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *Tolerance* mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/tolerance$, dan menunjukkan terdapat kolonieritas yang tinggi. Nilai *cut off* yang digunakan adalah untuk nilai *tolerance* 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10. Model yang baik adalah tidak terjadi multikolonieritas. Berikut kriterianya :

1. Nilai *tolerance* : $Tolerance \leq 0,10$ (tidak terjadi multikolonieritas).

$Tolerance = 0,10$ (terjadi multikolonieritas).

2. Nilai VIF : $VIF \geq 10,00$ (tidak terjadi multikolonieritas).

$VIF = 10,00$ (terjadi multikolonieritas)

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	101.788	1.543		65.950	.000		
	X1	1.269	2.251	.068	.564	.575	.903	1.107
	X2	-1.453	2.395	-.070	-.607	.546	.991	1.009
	X3	4.512	2.469	.219	1.828	.072	.902	1.109

a. Dependent Variable: Y

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation* (VIF). Jika nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,10 atau sama dengan VIF tidak kurang dari 10, maka dinyatakan tidak ada multikolonieritas

dalam model regresi. Sedangkan, jika nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau sama dengan VIF lebih dari 10, maka dinyatakan ada gejala multikolonieritas dalam model regresi. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Nilai *tolerance* variabel Dana Perimbangan (X1) $0,903 \geq 0,10$ dan nilai VIF $1.107 \leq 10$
2. Variabel Belanja Daerah (X2) nilai *tolerance* $0,991 \geq 0,10$ dan nilai VIF $1.009 \leq 10$
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) nilai *tolerance* $0,902 \geq 0,10$ dan nilai VIF $1.109 \leq 10$.

Seluruh nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,10 atau $\geq 0,10$ dan nilai VIF seluruh variabel tidak lebih dari 10 atau ≤ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa masing – masing variabel tidak ada multikolonieritas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varians dari residual satu pengamatan berbeda, disebut heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Dengan kriteria :

1. Apabila $Sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
2. Apabila $Sig < 0,05$ maka terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,295	3,621		2,291	,025
	X1	-,012	,015	-,362	-,772	,443
	X2	,005	,011	,265	,454	,651
	X3	,001	,016	,012	,051	,960

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*

Dari tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi X1 sebesar $0,443 > 0,05$, nilai signifikansi X2 sebesar $0,651 > 0,05$, dan nilai signifikan (X3) sebesar $0,960 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena gangguan pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu) dan tidak

perlu dilakukan pada data *cross section* seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan pada saat bersamaan. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi dapat dilihat dari kriteria nilai *Durbin-Waston* (DW) yaitu :

Dengan:

H_0 = tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a = ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

Tabel 4.10
Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,668 ^a	,446	,423	10,30008	2,070
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*

Berdasarkan tabel diatas nilai *Durbin Watson* menunjukkan angka 2,070 lebih besar dari batas atas (du) 1.7104. Dalam model regresi suatu data bisa dikatakan terbebas autokolerasi jika nilai *Durbin Watson* (DW) berada diantara $du < DW < 4 - du$. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat

disimpulkan $1,7104 < 2,070 < 2,296$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif (lihat pada tabel pengambilan keputusan).

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis tentang kekuatan variabel penentu (*independent variable*) terhadap pemanfaatan informasi kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda. Analisa regresi linear berganda adalah analisa tentang hubungan antara satu *dependent variable* dengan dua atau lebih *independent variable*. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	107,937	4,073		26,501	,000
	X1	-,012	,017	-,242	-,686	,495
	X2	-,008	,013	-,268	-,613	,542
	X3	,100	,018	,944	5,435	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*

Dari tabel 4.11 hasil uji analisis regresi linear berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 107,937 - 0,012 X_1 - 0,008 X_2 + 0,100 X_3 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 107,937 pada persamaan regresi tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel Dana Perimbangan (X1), Belanja Daerah (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (X3) bernilai tetap, maka nilai Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar 107,937 rupiah.
2. Nilai koefisien variabel Dana Perimbangan (X1) bernilai negatif, hal ini mengindikasikan bahwa, jika nilai Dana Perimbangan turun 1 rupiah, maka Kinerja Keuangan (Y) akan turun sebesar 0.012 rupiah, dengan asumsi nilai Belanja Daerah (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (X3) bernilai tetap
3. Nilai koefisien variabel Belanja Daerah (X2) bernilai negatif, hal ini mengindikasikan bahwa, jika nilai Belanja Daerah turun 1 rupiah, maka Kinerja Keuangan (Y) akan turun sebesar 0,008 rupiah, dengan asumsi nilai Dana Perimbangan (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X3) bernilai tetap
4. Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) bernilai positif, hal ini mengindikasikan bahwa, jika nilai Pendapatan Asli Daerah naik 1 rupiah, maka Kinerja Keuangan (Y) akan naik sebesar 0,100 rupiah, dengan Asumsi nilai Dana Perimbangan (X1) dan Belanja Daerah (X2) bernilai tetap.

4.5 Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap

konstan. Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriterianya adalah :

- a. Jika $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$ maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- b. Jika $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$ dan maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Untuk pengujian signifikansinya pada 0,05 ($\alpha=5\%$) dilakukan dengan kriteria adalah :

- a. Jika nilai signifikan $\text{sig} \leq 0,05$ maka hipotesis teruji yang berarti variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- b. Sebaliknya Jika signifikan $\text{sig} \geq 0,05$ maka hipotesis tidak teruji yang berarti variabel independen (X) berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 4.13
Hasil Uji t

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	107,937	4,073		26,501	,000
	X1	-,012	,017	-,242	-,686	,495
	X2	-,008	,013	-,268	-,613	,542
	X3	,100	,018	,944	5,435	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*

Berdasarkan tabel 4.13 dengan nilai signifikannya sebesar 0,05 dapat diketahui bahwa :

1. Nilai t_{hitung} $0,686 < t_{tabel}$ $1,6657$ dan nilai signifikansi t dari X_1 sebesar $0,495 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak yaitu tidak adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.
2. Nilai t_{hitung} $0,613 < t_{tabel}$ $1,6657$ dan nilai signifikansi t dari X_2 sebesar $0,542 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak yaitu tidak adanya pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan.
3. Nilai t_{hitung} $5,435 > t_{tabel}$ $1,6657$ dan nilai signifikansi t dari X_3 sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_3) diterima yaitu adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau *joint* mempengaruhi variabel independen . Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$ untuk *degree of freedom* (df)= n-k-2. Uji ini dilakukan dengan kriteria adalah :

- a. Jika nilai $|F_{hitung}| \geq F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

b. Jika nilai $|F \text{ hitung}| \leq F \text{ tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Untuk pengujian signifikansinya pada 0,05 ($\alpha=5\%$) dilakukan dengan kriteria adalah :

a. Jika nilai signifikan $\text{sig} \leq 0,05$ maka hipotesis teruji yang berarti variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

b. Sebaliknya Jika signifikan $\text{sig} \geq 0,05$ maka hipotesis tidak teruji yang berarti variabel independen (X) secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 4.14
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6146,364	3	2048,788	19,311	,000 ^b
	Residual	7638,599	72	106,092		
	Total	13784,963	75			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*

Dari hasil uji F diatas menunjukkan bahwa nilai $F_{\text{hitung}} 19,311 \geq F_{\text{Tabel}} 2,34$ dengan nilai signifikannya $0,00 \leq 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Dana Perimbangan (X1), Belanja Daerah (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (X3) secara simultan terhadap Kinerja Keuangan (Y).

4.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinansi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi dan dapat menjelaskan variabel dependennya. Dalam Penelitian ini R^2 yang digunakan adalah nilai Adjusted R square. Dari hasil analisis data menggunakan program IBM SPSS 25.0 telah dihasilkan tabel hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 4.15
Hasil uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,668 ^a	,446	,423	10,30008
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*

Dari tabel diatas diketahui bahwa Adjusted R square sebesar 0,423 atau 42,3%. Hal ini berarti 42,3% dari variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan dipengaruhi oleh variabel independent yaitu Dana Perimbangan (X1), Belanja Daerah (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (X3). Sedangkan sisanya 57,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, variabel lain yang mempengaruhi adalah Kekayaan Daerah (Ibrahim dan Aliamin, 2015), Belanja Modal (Pratiwi, 2018) dan variabel lainnya.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Hamid (2018). Anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk daerah tergantung dari seberapa besar daerah tersebut membutuhkan dana serta dilihat dari berbagai prepektif termasuk kondisi demografis setiap daerahnya. Semakin meningkat Pengalokasian Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah, maka semakin meningkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut, semakin baik kinerja keuangannya, maka semakin banyak dana perimbangan dialokasikan kepada pemerintah daerah tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andirfa (2016) menyatakan bahwa secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya semakin besar jumlah penerimaan transfer dana perimbangan maka semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil analisis hipotesis (H1), dapat diketahui bahwa, hipotesis pertama (H1) ditolak, sehingga tidak terdapat pengaruh antara Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} 0,686 < t_{tabel} 1,6657$ dan nilai signifikansi t dari X1 sebesar $0,495 > 0,05$.

Hasil ini didukung juga oleh penelitian (Anggreni dan Artini, 2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan dan dalam penelitian (Pratiwi, 2018) menyatakan bahwa pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan berpengaruh positif.

4.7.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berjalan. Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Selain itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Belanja merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem APBD berbasis kinerja. Semakin meningkat alokasi belanja daerah dalam APBD suatu pemerintah daerah, akan mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Hal ini dikarenakan Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis hipotesis (H2), dapat diketahui bahwa, hipotesis pertama (H2) ditolak, sehingga tidak terdapat pengaruh antara Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan

nilai t_{hitung} $0,613 < t_{tabel}$ $1,6657$ dan nilai signifikansi t dari X^2 sebesar $0,542 > 0,05$.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian (Saputri, 2020), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara belanja daerah terhadap kinerja keuangan dan dalam penelitian Retnowati (2016), terdapat pengaruh positif antara belanja daerah terhadap kinerja keuangan.

4.7.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi wilayah yang dipungut sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Semakin meningkat PAD, maka kinerja keuangan akan meningkat. Hal ini dikarenakan, PAD sebagai tulang punggung dalam pembiayaan daerah yang memiliki kontribusi terhadap APBD dengan pemahaman, semakin tinggi pendapatan daerah yang dihasilkan maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah dianggap mampu dalam membangun daerahnya sendiri dan dapat memungkinkan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan kegiatan daerah tanpa tergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Liando, 2017;36).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor pendukung dari kinerja ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendorong peningkatan investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik dan diikuti investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

Berdasarkan hasil analisis hipotesis (H3), dapat diketahui bahwa, hipotesis pertama (H3) diterima, sehingga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} 5,435 > t_{tabel} 1,6657$ dan nilai signifikansi t dari X3 sebesar $0,000 < 0,05$.

Dalam Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Antari dan Sedana (2018), Sealys Harie Saputri (2020) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan berpengaruh negatif oleh penelitian (Wahyuningsih 2020).

4.7.4 Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah secara Simultan Terhadap Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Membagi ukuran kinerja menjadi dua, yaitu ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja non-keuangan. Kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, yaitu dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Di pihak lain, kinerja non-keuangan dapat dilihat dari kualitas pelayanan, kedisiplinan, kepuasan pelanggan dan sebagainya.

Semakin meningkat Pengalokasian Dana Perimbangan, Meningkatnya Belanja Daerah, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, akan mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah lebih baik. Hal ini dikarenakan

Pengalokasian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut, semakin baik kinerja keuangannya, maka semakin banyak dana perimbangan dialokasikan kepada pemerintah daerah tersebut.

Dari hasil analisis data perolehan nilai $F_{hitung} 19,311 > F_{Tabel} 2,34$ dengan nilai signifikannya $0,00 < 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Dana Perimbangan (X1), Belanja Daerah (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (X3) secara simultan terhadap Kinerja Keuangan (Y). Berdasarkan data sekunder yang diolah, terjadi 42,3% pengaruh dari variabel dependen yaitu kinerja keuangan terhadap variabel independen.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Pratiwi (2018) dan Saputri (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel-variabel tersebut. Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Selain itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah. PAD sebagai tulang punggung dalam pembiayaan daerah yang memiliki kontribusi terhadap APBD dengan pemahaman, semakin tinggi pendapatan daerah yang dihasilkan maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah dianggap mampu dalam membangun daerahnya sendiri dan dapat memungkinkan daerah tersebut

dalam memenuhi kebutuhan kegiatan daerah tanpa tergantung pada pemerintah pusat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2017-2020, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai t_{hitung} $0,686 < t_{tabel}$ $1,6657$ dan nilai signifikansi t dari X_1 sebesar $0,495 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak yaitu tidak ada pengaruh antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.
2. Nilai t_{hitung} $0,613 < t_{tabel}$ $1,6657$ dan nilai signifikansi t dari X_2 sebesar $0,542 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak yaitu tidak ada pengaruh antara belanja daerah terhadap kinerja keuangan.
3. Nilai t_{hitung} $5,435 > t_{tabel}$ $1,6657$ dan nilai signifikansi t dari X_2 sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_3) diterima yaitu adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan.
4. Nilai F_{hitung} $19,311 > F_{Tabel}$ $2,34$ dengan nilai signifikannya $0,00 < 0,05$ artinya secara simultan ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Dana Perimbangan (X_1), Belanja Daerah (X_2), dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) terhadap Kinerja Keuangan (Y).

5. Nilai Adjusted R square sebesar 0,423 atau 42,3%. Hal ini berarti 42,3% dari variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan dipengaruhi oleh variabel independent yaitu Dana Perimbangan (X1), Belanja Daerah (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (X3). Sedangkan 57,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lainnya adalah Kekayaan Daerah (Ibrahim dan Aliamin, 2015), Belanja Modal (Pratiwi, 2018).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran-saran yang diajukan adalah

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat agar dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya agar dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, serta memperhatikan alokasi terhadap anggaran belanja yang dikeluarkan agar lebih efisien dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, baik kinerja keuangan maupun pelayanan publik.
2. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel independen yang berkaitan seperti dana perimbangan, belanja daerah, pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan Dana Hibah Pemerintah Pusat, Dan-lain-lain, agar dapat diketahui lebih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwibowo, Tungki. 2015. "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi* 11:335.
- Anggreni, Ni Ketut Ayu, Sri Artini, Luh Gede (2018). "Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali". Skripsi.
- Antari, Ni Putu Gina Sukma, Sedana, Ida Bagus Panji, 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Skripsi.
- Ayu, Puspita Putri. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal." *Jurnal Akuntansi & Ekonomi* 3(1):80–96.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nanang Martono.(2014).*Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Ke 2*.Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pongoh, Marsel. 2013. "Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt. Bumi Resources Tbk." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1(3):669–79. doi: 10.35794/emba.v1i3.2135.
- Prasasti, Swastika, and Ratna Sari. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

(Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Diy Tahun 2007-2013).” *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 12(1):1–13.

Pratiwi, Tri Yuni. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.” Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018.

Purwasih. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus di provinsi daerah istimewa yogyakarta).

Putri, Evrintia Dini. 2015. “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.” 151:10–17. doi: 10.1145/3132847.3132886.

Saputri, Sealys. 2020. “pengaruh dana perimbangan, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah .” *E- Jurnal EP Unud* (23):452–59.

Siti Nur Rochmah. 2015. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* 151:10–17. doi: 10.1145/3132847.3132886.

Sugiyono, Prof. Dr. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahyuningsih, Yoshinta Endah. 2020. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 15(2):111. doi: 10.25105/jipak.v15i2.6226.

LAMPIRAN

1. Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)		
	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
2017	Rp. 2.530.121.133	Rp. 14.829.844.350	Rp. 19.415.152.589
2018	Rp. 1.977.353.904	Rp. 15.051.531.840	Rp. 19.825.614.942
2019	Rp. 2.097.851.123	Rp. 15.865.822.519	Rp. 21.846.652.410
2020	Rp. 2.650.316.185	Rp. 16.039.147.172	Rp. 22.825.783.224
Total	Rp. 9.255.642.345	Rp. 61.786.345.881	Rp. 83.913.203.165
Persentase	6,1%	39,8%	54,1%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2. Data Keuangan Dana Perimbangan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Dalam Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	731.385.235.580	776.846.474.070	818.830.711.080	800.809.146.000
2	Kabupaten Pesisir Selatan	1.109.254.189.930	1.120.389.365.020	1.213.725.540.000	1.243.067.977.000
3	Kabupaten Solok	911.897.537.820	936.193.160.460	980.735.199.200	972.973.643.220
4	Kabupaten Sijunjung	710.605.073.000	700.524.758.000	737.765.488.570	675.595.794.000
5	Kabupaten Tanah Datar	928.980.499.000	944.906.738.000	984.486.247.000	992.118.633.000
6	Kabupaten Padang Pariaman	1.059.564.099.180	1.087.053.036.000	1.139.643.299.240	1.144.196.529.000
7	Kabupaten Agam	1.078.038.916.000	1.092.066.031.000	1.143.589.672.000	1.198.855.509.000
8	Kabupaten Limapuluh Kota	992.052.783.000	997.618.221.000	1.016.024.131.820	1.070.332.801.250
9	Kabupaten Pasaman	767.064.865.460	755.591.287.380	784.976.915.140	818.742.944.000
10	Kabupaten Solok Selatan	641.966.526.860	636.215.119.810	695.366.633.770	744.501.081.000
11	Kabupaten Dharmasraya	696.906.890.930	708.972.421.760	761.630.742.880	803.020.617.370
12	Kabupaten Pasaman Barat	835.170.390.500	887.119.463.270	919.575.539.340	956.013.710.370
13	Kota Padang	1.360.290.810.170	1.427.702.319.550	1.524.369.870.000	1.542.219.925.000
14	Kota Solok	472.503.110.000	481.477.263.000	508.925.258.580	493.691.086.000
15	Kota Sawahlunto	467.157.187.000	458.504.259.000	495.141.841.000	508.874.543.000
16	Kota Padang Panjang	439.519.041.000	442.112.700.000	453.085.922.600	457.677.364.370
17	Kota Bukittinggi	516.228.868.600	523.061.869.000	552.063.924.510	552.771.328.950
18	Kota Payakumbuh	596.081.338.110	565.250.189.020	609.589.230.920	579.307.233.000
19	Kota Pariaman	515.176.988.200	509.927.165.550	526.296.352.130	484.377.306.840

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

3. Data Keuangan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Dalam Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.011.688.194.890	900.575.703.010	987.162.174.110	1.019.432.615.020
2	Kabupaten Pesisir Selatan	1.507.585.932.640	1.569.020.950.590	1.693.639.524.000	1.854.122.929.690
3	Kabupaten Solok	1.176.599.853.200	1.167.465.763.910	1.247.720.963.300	1.262.524.496.560
4	Kabupaten Sijunjung	896.035.326.000	958.138.803.000	1.000.514.064.760	926.764.551.000
5	Kabupaten Tanah Datar	1.218.833.756.000	1.238.097.675.000	1.350.362.869.000	1.458.450.549.000
6	Kabupaten Padang Pariaman	1.414.773.624.150	1.409.350.454.000	1.444.556.894.030	1.493.629.132.000
7	Kabupaten Agam	1.396.921.201.000	1.387.560.260.000	1.507.715.256.000	1.557.010.916.000
8	Kabupaten Limapuluh Kota	1.258.249.159.000	1.244.907.868.000	1.362.116.350.440	1.455.355.562.910
9	Kabupaten Pasaman	999.002.451.400	981.817.133.900	1.012.301.501.110	1.116.938.658.380
10	Kabupaten Solok Selatan	822.917.429.050	788.835.587.430	867.437.319.240	952.575.457.910
11	Kabupaten Dharmasraya	935.591.361.570	931.599.585.820	1.036.553.410.710	1.102.724.580.350
12	Kabupaten Pasaman Barat	1.021.292.710.630	1.169.523.754.460	1.194.094.598.480	1.341.712.718.860
13	Kota Padang	2.077.455.348.190	2.177.863.598.830	3.081.739.853.000	2.745.995.435.000
14	Kota Solok	556.789.190.790	648.548.438.000	611.570.146.850	688.964.333.050
15	Kota Sawahlunto	587.085.097.000	582.394.701.000	622.472.823.000	682.764.181.000
16	Kota Padang Panjang	608.108.212.010	613.485.174.000	600.204.262.750	644.519.550.990
17	Kota Bukittinggi	590.688.034.800	705.251.103.000	717.087.566.900	996.015.381.340
18	Kota Payakumbuh	694.223.803.930	716.396.747.760	805.939.541.100	841.602.921.880
19	Kota Pariaman	641.311.903.000	634.781.641.160	703.463.292.080	684.679.152.630

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

4. Data Keuangan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Dalam Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	68.477.676.600	45.358.184.270	40.063.395.070	50.316.759.000
2	Kabupaten Pesisir Selatan	176.902.866.670	123.906.524.440	134.804.594.000	156.419.589.080
3	Kabupaten Solok	113.269.815.420	67.936.258.790	74.595.778.020	75.296.758.350
4	Kabupaten Sijunjung	107.915.721.000	79.055.940.000	83.906.454.920	58.785.769.000
5	Kabupaten Tanah Datar	172.812.023.000	115.914.188.000	129.785.828.000	165.000.448.000
6	Kabupaten Padang Pariaman	141.310.805.690	84.472.664.000	101.607.521.620	109.467.232.000
7	Kabupaten Agam	161.539.091.000	99.684.205.000	123.658.589.000	125.059.320.000
8	Kabupaten Limapuluh Kota	119.771.917.000	73.442.509.000	85.168.153.330	100.575.904.210
9	Kabupaten Pasaman	142.748.233.330	100.054.438.440	98.595.691.290	95.921.682.400
10	Kabupaten Solok Selatan	75.588.033.100	60.545.296.360	67.842.785.840	70.918.707.160

11	Kabupaten Dharmasraya	98.937.393.390	84.116.203.860	78.882.919.150	104.794.164.000
12	Kabupaten Pasaman Barat	158.920.863.870	158.872.998.660	104.052.818.020	142.978.775.350
13	Kota Padang	548.653.179.270	487.834.642.410	546.108.570.000	881.995.807.000
14	Kota Solok	41.852.774.000	40.742.809.000	41.651.875.800	46.000.000.000
15	Kota Sawahlunto	63.082.759.000	47.227.132.000	57.170.994.000	61.765.679.000
16	Kota Padang Panjang	88.837.034.000	79.752.372.000	77.323.150.460	97.543.849.570
17	Kota Bukittinggi	102.022.621.330	101.936.793.000	111.896.596.610	151.437.934.800
18	Kota Payakumbuh	116.596.479.800	94.287.442.040	104.070.234.420	122.250.122.860
19	Kota Pariaman	30.881.846.110	32.213.303.040	36.665.174.230	33.787.684.140

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

5. Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Dalam Persen)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer pusat}} \times 100\%$$

NO	Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Agam	15	9,12	10,8	10,4
2	Kabupaten Dharmasraya	14,2	11,8	10,3	13
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	9,36	5,9	4,89	6,28
4	Kabupaten Limapuluh Kota	12	7,36	8,38	9,39
5	Kabupaten Padang Pariaman	13,3	7,77	8,91	9,56
6	Kabupaten Pasaman	18,6	13,2	12,5	11,7
7	Kabupaten Pasaman Barat	19	17,9	11,3	14,9
8	Kabupaten Pesisir Selatan	15	11	11,1	12,5
9	Kabupaten Sijunjung	15,1	11,2	11,3	8,7
10	Kabupaten Solok	12,4	7,25	7,6	7,73
11	Kabupaten Solok Selatan	11,7	9,51	9,75	9,52
12	Kabupaten Tanah Datar	18,6	12,2	13,1	16,6
13	Kota Bukittinggi	19,7	19,4	20,2	27,3
14	Kota Padang	40,3	34,1	35,8	57,1
15	Kota Padang Panjang	20,2	18	17	21,3
16	Kota Pariaman	5,99	6,31	6,96	6,97
17	Kota Payakumbuh	19,5	16,6	17	21,1
18	Kota Sawahlunto	13,5	10,3	11,5	12,1
19	Kota Solok	8,85	8,46	8,18	9,31

Sumber : Data Diolah (2021)

6. Data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (Dalam Persen)

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Total Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

No	Kabupaten/Kota	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Agam	78,2	78,5	75,6	78,3
2	Kabupaten Dharmasraya	73,4	76,5	74,7	77,8
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	79,6	85	80,9	82,1
4	Kabupaten Limapuluh Kota	77,7	79,3	76	77,5
5	Kabupaten Padang Pariaman	76,3	78	75,4	77,3
6	Kabupaten Pasaman	76,8	76,4	75,7	76,7
7	Kabupaten Pasaman Barat	77,9	78,2	76,1	74,5
8	Kabupaten Pesisir Selatan	73,2	73,2	71,4	69,5
9	Kabupaten Sijunjung	72,8	74,3	73,9	79,3
10	Kabupaten Solok	79,6	80,4	78,1	78,9
11	Kabupaten Solok Selatan	80,6	80	76,1	81,2
12	Kabupaten Tanah Datar	69,1	76,8	73,4	74,2
13	Kota Bukittinggi	79	75,1	75,2	68,7
14	Kota Padang	65	66	64,8	57,3
15	Kota Padang Panjang	74,3	79,8	78,3	76,8
16	Kota Pariaman	80,6	81,3	78,1	76,9
17	Kota Payakumbuh	80,6	79,7	76,5	73,7
18	Kota Sawahlunto	79,7	78,1	77,4	80,5
19	Kota Solok	79,1	85	82,6	80,8

Sumber : *Data Diolah (2021)*

7. Data Rasio Desentralisasi Fiskal (Dalam Persen)

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

No	Kabupaten/Kota	Rasio Desentralisasi Fiskal			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Agam	11,7	7,17	8,18	8,17
2	Kabupaten Dharmasraya	10,4	9,1	7,73	10,1
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	7,46	4,96	3,96	5,15
4	Kabupaten Limapuluh Kota	9,38	5,84	6,37	7,28
5	Kabupaten Padang Pariaman	10,1	6,06	6,72	7,39
6	Kabupaten Pasaman	14,2	10,1	9,51	89,8
7	Kabupaten Pasaman Barat	14,8	14	8,61	11,1
8	Kabupaten Pesisir Selatan	11,6	8,1	7,93	8,75
9	Kabupaten Sijunjung	11	8,39	8,41	6,9
10	Kabupaten Solok	9,89	5,84	5,94	6,1
11	Kabupaten Solok Selatan	9,49	7,61	7,42	7,74

12	Kabupaten Tanah Datar	12,8	9,42	9,68	12,3
13	Kota Bukittinggi	15,6	14,6	15,2	18,8
14	Kota Padang	26,2	22,5	23,2	32,8
15	Kota Padang Panjang	15	14,4	13,3	16,3
16	Kota Pariaman	4,83	5,13	5,44	5,36
17	Kota Payakumbuh	15,7	13,3	13	15,5
18	Kota Sawahlunto	10,7	8,05	8,93	9,77
19	Kota Solok	7	7,2	6,76	7,52

Sumber : *Data Diolah (2021)*

8. Data Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Dalam Persen)

No	Kabupaten/Kota	Kinerja Keuangan			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Agam	104,9	94,79	94,58	96,87
2	Kabupaten Dharmasraya	98	97,4	92,73	100,9
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	96,42	95,86	89,75	93,53
4	Kabupaten Limapuluh Kota	99,08	92,5	90,75	94,17
5	Kabupaten Padang Pariaman	99,7	91,83	91,03	94,25
6	Kabupaten Pasaman	109,6	99,7	97,71	178,2
7	Kabupaten Pasaman Barat	111,7	110,1	96,01	100,5
8	Kabupaten Pesisir Selatan	99,8	92,3	90,43	90,75
9	Kabupaten Sijunjung	98,9	93,89	93,61	94,9
10	Kabupaten Solok	101,89	93,49	91,64	92,73
11	Kabupaten Solok Selatan	101,79	97,12	93,27	98,46
12	Kabupaten Tanah Datar	100,5	98,42	96,18	103,1
13	Kota Bukittinggi	114,3	109,1	110,6	114,8
14	Kota Padang	131,5	122,6	123,8	147,2
15	Kota Padang Panjang	109,5	112,2	108,6	114,4
16	Kota Pariaman	91,42	92,74	90,5	89,23
17	Kota Payakumbuh	115,8	109,6	106,5	110,3
18	Kota Sawahlunto	103,9	96,45	97,83	102,37
19	Kota Solok	94,95	100,66	97,54	97,63

Sumber : *Data Diolah (2021)*

9. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics								
	N	Range	Min	Max	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
X1	76	1103,0	439,0	1542,0	812,513	31,9755	278,7561	77704,946

X2	76	2525,0	556,0	3081,0	1103,618	54,2135	472,6223	223371,839
X3	76	851,0	30,0	881,0	121,224	14,6820	127,9949	16382,683
Y	76	88,97	89,23	178,20	101,9967	1,55513	13,55727	183,800
N	76							

Sumber : Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00

10. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Transform_RES
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	7,3294
	Std. Deviation	4,04418
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,073
	Negative	-,051
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00

11. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	101.788	1.543		65.950	.000		
	X1	1.269	2.251	.068	.564	.575	.903	1.107
	X2	-1.453	2.395	-.070	-.607	.546	.991	1.009
	X3	4.512	2.469	.219	1.828	.072	.902	1.109

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00

12. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,295	3,621		2,291	,025
	X1	-,012	,015	-,362	-,772	,443
	X2	,005	,011	,265	,454	,651
	X3	,001	,016	,012	,051	,960

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*

13. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,668 ^a	,446	,423	10,30008	2,070

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*

14. Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	107,937	4,073		26,501	,000
	X1	-,012	,017	-,242	-,686	,495
	X2	-,008	,013	-,268	-,613	,542
	X3	,100	,018	,944	5,435	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*

15. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	107,937	4,073		26,501	,000
	X1	-,012	,017	-,242	-,686	,495
	X2	-,008	,013	-,268	-,613	,542
	X3	,100	,018	,944	5,435	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*

16. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6146,364	3	2048,788	19,311	,000 ^b
	Residual	7638,599	72	106,092		
	Total	13784,963	75			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*

17. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,668 ^a	,446	,423	10,30008

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 25.00*